

# POTENSI DAN STRATEGI PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT DI KABUPATEN BIREUEN PROVINSI ACEH

*Potential and Forest of the People Development Strategy in the District of Bireuen Aceh Province*

Joko Widiyantol<sup>1)</sup>, Hairul Basri<sup>2)</sup>, dan Dahlan<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>BPDAS Aceh, Jl. Cut Nyak Dhin Km 1,2 Kotak Pos 174 Banda Aceh, e-mail: joko\_hidayati@yahoo.com

<sup>2)</sup> Fakultas Pertanian Unsyiah, Jln Tgk. Hasan Krueng Kalee No. 3 Darussalam Banda Aceh 23111

<sup>3)</sup> Fakultas MIPA Unsyiah, Darussalam, Banda Aceh 23111

Naskah diterima 1 Maret 2012, disetujui 12 April 2012

**Abstract:** *This study aims to analyze the potential and forest of the people development strategy in the district of Bireuen Aceh Province. The method used are by comparing the characteristics of the land with the requirements of growing crops to be grown is sengon, jabon and mahogany. Forest plantations of the people development strategy derived from the SWOT analysis. The results of assessment of land suitability classes at study sites throughout the observation point has a corresponding class of the actual marginal land suitability (S<sub>3</sub>) with a slope of the limiting factors and potential land suitability is quite suitable (S<sub>2</sub>) with the limiting factor of temperature, rainfall and the effective depth. SWOT analysis results showed that the total score internal factor is the strength of 3.504; weakness of internal factors 1.481, whereas the opportunities for external factors of 3.573; external threat of 1.367. The position of the forest plantations of the people development strategy lies in quadrant 1 with the coordinates (2.023; 2.206). The strategy is a priority for this condition is applied in the SO strategy (strength - opportunity) which supports an aggressive policy of growth by leveraging the opportunities that exist to force in developing forest plantations of the people in the district of Bireuen.*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan strategi pengembangan hutan rakyat di Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh. Metode yang digunakan untuk adalah membandingkan data karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman yang akan ditanam yaitu sengon, jabon dan mahoni. Strategi pengembangan hutan tanaman rakyat diperoleh dari analisis SWOT. Hasil penilaian penelitian menunjukkan bahwa kelas kesesuaian lahan seluruh areal pengamatan secara aktual sesuai marginal (S<sub>3</sub>) dengan faktor pembatas kelerengan, dan kesesuaian lahan potensial cukup sesuai (S<sub>2</sub>) dengan faktor pembatas temperatur, curah hujan dan kedalaman efektif. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa total skor faktor internal kekuatan adalah sebesar 3,504; faktor internal kelemahan sebesar 1,481; sedangkan untuk faktor eksternal peluang sebesar 3,573; faktor eksternal ancaman sebesar 1,367. Posisi strategi pengembangan hutan tanaman rakyat terletak pada kuadran 1 dengan nilai koordinat (2,023 ; 2,206). Strategi yang menjadi prioritas untuk diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi SO (*strength – Opportunity*) yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dengan memanfaatkan peluang yang ada menjadi kekuatan dalam mengembangkan hutan tanaman rakyat di Kabupaten Bireuen.

**Kata Kunci:** hutan rakyat, analisis SWOT, Bireuen

## PENDAHULUAN

Hutan merupakan anugerah dan amanah Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara. Hutan memberikan manfaat serba guna, karenanya harus dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya. Hutan merupakan salah satu sumberdaya alam yang mempunyai peran penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat serta kelestarian lingkungan dan

tidak boleh lepas dari aturan-aturan dalam pengelolaannya.

Menteri Kehutanan seringkali mengutarakan kegalauannya tentang fenomena tidak logis yang dialami oleh masyarakat sekitar hutan. Semakin dekat ke hutan maka terdapat kecenderungan masyarakat akan semakin miskin. Ini tidak logis karena hutan dengan segenap kekayaan yang ada di dalamnya seharusnya menjadi sumber kehidupan masyarakat yang bermukim di dekatnya. Beberapa pakar berpendapat bahwa hal

demikian terjadi karena 2 (dua) faktor penyebab, yaitu kurangnya akses masyarakat sekitar hutan pada pemanfaatan lahan dan kurangnya akses masyarakat terhadap aspek pemodalan. Kedua hal ini menjadikan masyarakat sekitar hutan cenderung hanya menjadi penonton pada setiap aktifitas pengelolaan hutan dan tanpa memperoleh manfaat langsung dari sumber daya alam yang ada dihadapannya.

Kementerian Kehutanan melakukan revitalisasi sektor kehutanan yang salah satu polanya adalah memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan untuk ikut berpartisipasi secara efektif mengelola kawasan hutan, khususnya kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan hutan lestari melalui Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tanggal 06 Juli 2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman.

Kabupaten Bireuen memiliki kawasan hutan produksi tetap seluas 30.279,20 hektar dan hutan produksiterbatasseluas 4.656,08hektar. Atasdasar hasil observasi lapangan dan kondisi terkini, diketahui bahwa kurang lebih 1.335 hektar areal kawasan hutan produksi di Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen sudah rusak, tidak produktif dan belum dibebani hak sehingga pemerintah Kabupaten Bireuen mengusulkan kawasan hutan produksi seluas 1.335 hektar tersebut sebagai areal pencadangan HutanTanaman Rakyat (HTR) kepada Menteri Kehutanan. Pada tanggal 19 Oktober 2009 Menteri Kehutanan telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: SK. 723/Menhut-II/2009 tentang Pencadangan Areal untuk Pembangunan HTR di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh seluas 1.335 hektar.

Merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan di atas, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bireuen melaksanakan program pengembangan HTR. Program Hutan Tanaman Rakyat diharapkan akan mampu mengubah hutan tidak produktif menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan sesuai dengan program pembangunan Kabupaten Bireuen khususnya di sektor kehutanan.

Pengembangan HTR juga diharapkan bisa menjadi solusi pemenuhan kebutuhan kayu masyarakat Kabupaten Bireuen sehubungan

dengan diberlakukannya Instruksi Gubernur Aceh Nomor: 05/INSTR/2007 tahun 2007 tentang *Moratorium Logging* (Penghentian Sementara Penebangan Hutan) di Provinsi Aceh. Keberhasilan program pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen sangat ditentukan banyak faktor, antara lain : pencadangan areal untuk pengembangan HTR, potensi areal yang telah dicadangkan untuk pengembangan HTR berdasarkan kelas kesesuaian lahannya, strategi pengembangan HTR, peraturan perundang-undangan, dukungan dari pemerintah, ketertarikan dan partisipasi masyarakat, ketersediaan pasar bagi hasil hutan dari HTR dan lain-lain. Sampai saat ini belum diketahui informasi mengenai potensi areal pencadangan HTR berdasarkan kelas kesesuaian lahan serta strategi yang akan diterapkan dalam pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen. Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka penelitian mengenai analisis potensi dan strategi pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen perlu untuk dilakukan.

## METODOLOGI

Penelitian dilaksanakan di tiga tempat, yaitu di Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah I Banda Aceh untuk pengolahan data, di lapangan yaitu di 2 (dua) lokasi yaitu Kecamatan Simpang Mamplam dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng Kabupaten Bireuen untuk pengambilan data lapangan dan contoh tanah serta Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh untuk analisis contoh tanahnya. Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September sampai dengan bulan November 2011 selama 3 (tiga) bulan.

Penelitian diawali dengan *overlay* peta areal pencadangan HTR dari Menteri Kehutanan dengan peta RTRWK Kabupaten Bireuen. Dari *overlay* akan diperoleh peta areal pencadangan HTR di Kabupaten Bireuen. Untuk memudahkan dalam pelaksanaan survei ke lapangan maka dibuat satuan peta lahan (SPL) berdasarkan kelas kelerengan, jenis tanah serta jenis penggunaan lahan. Berdasarkan SPL yang telah dibuat, selanjutnya dilakukan survei lapangan untuk mengambil data morfologi lahan yang meliputi jenis tanah, lereng, drainase, kedalaman efektif, penutup lahan, tekstur tanah di lapang, pH tanah lapang, fisiologi dan data iklim (curah hujan dan suhu)

dan pengambilan contoh tanah. Selanjutnya dilakukan analisis tanah terhadap contoh tanah yang telah diambil untuk mendapatkan data analisis tanah. Analisis tanah dilaksanakan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala. Berdasarkan data morfologi dan data analisis tanah akan diperoleh data karakteristik lahan. Untuk menetapkan kelas kesesuaian lahan, data karakteristik lahan tersebut dibandingkan (*matching*) dengan persyaratan tumbuh tanaman yang akan ditanam yaitu sengon, jabon dan mahoni berdasarkan kriteria LREP II (1994). Berdasarkan kelas kesesuaian lahan tersebut maka akan diketahui potensi pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen.

Untuk mengetahui strategi pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen dilaksanakan analisis SWOT. Untuk memperoleh informasi mengenai variabel-variabel yang menjadi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen dilakukan FGD (*Focus Group Discussion*) dengan peserta FGD adalah pegawai Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi (BPPHP) Wilayah I Banda Aceh yang menangani HTR, pegawai Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen, anggota koperasi pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK-HTR) di Kabupaten Bireuen dan tenaga pendamping HTR yang ada di Kabupaten Bireuen. Berdasarkan variabel-variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sudah didapatkan dari hasil FGD, selanjutnya dibuat kuesioner terhadap responden (terlampir) dan dilakukan analisis SWOT terhadap hasil kuesioner dari responden. Prosedur pelaksanaan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

Menyusun matrik faktor-faktor eksternal dan faktor-faktor internal dari masing-masing peubah pengembangan HTR, kemudian mengidentifikasi variabel-variabel eksternal berupa peluang dan ancaman serta variabel-variabel internal berupa kekuatan dan kelemahan.

Menentukan bobot dan rating dari masing-masing variabel faktor eksternal dan internal melalui kuesioner terhadap 27 orang responden yang terdiri dari 5 orang pegawai BPPHP Wilayah I Banda Aceh, 2 orang pendamping HTR, 5 orang pegawai Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan

Kabupaten Bireuen, 15 orang masyarakat yang menjadi anggota 3 koperasi pemegang IUPHHK-HTR di Kabupaten Bireuen. Skala bobot mulai dari 1,0 (paling penting) sampai 0,0 (tidak penting). Bobot diperoleh dari perbandingan jumlah nilai tingkat kepentingan masing-masing variabel terhadap nilai total tingkat kepentingan seluruh variabel berdasarkan hasil kuesioner terhadap 27 responden (terlampir). Skala rating mulai dari 4 (paling berpengaruh) sampai 1 (tidak berpengaruh) berdasarkan pengaruh masing-masing faktor. Pemberian nilai rating untuk faktor kekuatan dan peluang bersifat positif (kekuatan dan peluang yang sangat berpengaruh diberi rating 4, tetapi jika kekuatan dan peluang tidak berpengaruh diberi rating 1). Pemberian nilai rating kelemahan dan ancaman adalah kebalikannya, jika kelemahan dan ancaman sangat berpengaruh diberi rating 1, tetapi jika kelemahan dan ancaman tidak berpengaruh diberi rating 4.

Skor masing-masing variabel eksternal dan internal ditentukan dengan mengalikan bobot dan rating dari masing-masing variabel tersebut. Berdasarkan hasil scoring, kemudian disusun diagram SWOT untuk menentukan strategi pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen. Untuk dapat membandingkan antara perbandingan kekuatan dan kelemahan (diwakili garis horisontal) dengan perbandingan peluang dan ancaman (diwakili garis vertikal). Pada diagram tersebut kekuatan dan peluang diberi tanda positif, sedangkan kelemahan dan ancaman diberi tanda negatif. Dengan menempatkan selisih nilai S (kekuatan) – W (kelemahan) pada sumbu (x), dan menempatkan selisih antara O (peluang) – T (ancaman) pada sumbu (y), maka ordinat (x,y) akan menempati salah satu sel dari diagram SWOT. Letak nilai S – W dan O – T dalam diagram SWOT akan menentukan strategi yang akan ditempuh dalam pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen.

Untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan dilakukan dengan cara membandingkan (*matching*) antara karakteristik lahan dengan persyaratan tumbuh tanaman sengon, jabon dan mahoni berdasarkan kriteria LREP II (1994). Potensi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) diketahui berdasarkan kelas kesesuaian lahan. Untuk mengetahui strategi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR), analisis yang digunakan adalah analisis SWOT,

dengan melihat faktor internal dan faktor eksternal. Faktor-faktor internal yang dapat dianalisis yaitu kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*), sedangkan faktor-faktor eksternal yang dapat dianalisis yaitu peluang (*Opportunity*) dan ancaman (*Threat*), dimana variabel-variabel kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman diperoleh dari hasil FGD (*Focus Group Discussion*) dan pemberian bobotnya dilakukan dengan kuesioner terhadap 27 orang responden, sedangkan pemberian rating dengan menggunakan Skala Likert berdasarkan pengaruh masing-masing faktor. Analisis ini menghasilkan peubah-peubah yang bersifat strategis yang terdiri dari faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Bireuen. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan dalam menyusun strategi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat yang dijadikan dasar untuk menjawab tujuan 2 dari penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Areal Pencadangan HTR

Peta areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Bireuen yang merupakan lokasi penelitian diperoleh dari hasil *overlay* antara peta RTRW Kabupaten Bireuen tahun 2009 dengan peta pencadangan Hutan Tanaman Rakyat dari Menteri Kehutanan tahun 2009. Hasil penelitian menunjukkan bahwa total luas areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Bireuen adalah 1.055,19 hektar yang merupakan kawasan hutan produksi.

Persyaratan areal untuk bisa dijadikan areal pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 adalah areal tersebut harus berada di kawasan hutan produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa dari total areal pencadangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) dari Menteri Kehutanan di Kabupaten Bireuen adalah seluas 1.335 hektar, hanya 1.055,19 hektar yang memenuhi syarat untuk bisa dijadikan areal pengembangan Hutan Tanaman Rakyat karena berada di kawasan hutan produksi.

### Satuan Peta Lahan (SPL)

Penetapan satuan peta lahan (SPL) berdasarkan faktor lereng, jenis tanah dan penggunaan lahan. Berdasarkan ketiga faktor tersebut diperoleh 3 (tiga) SPL seperti Tabel 1.

Satuan peta lahan (SPL-1) merupakan kawasan bertopografi perbukitan dengan lereng 15 – 25 %. Kawasan ini terletak di Kecamatan Simpang Mamplam yang luasnya mencapai 28,12 hektar dan berada di kawasan hutan produksi dengan penggunaan lahan untuk Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Jenis tanah yang ditemukan pada kawasan ini adalah Ultisol, drainase tanah baik. Kawasan ini tidak dipengaruhi oleh banjir. Ketinggian tempat mencapai 117 m dpl.

Tabel 1. Satuan peta lahan Kabupaten Bireuen

No	SPL	Jenis Tanah	Lereng (%)	Luas (ha)
1	1	Ultisol	15 - 25	28,12
2	2	Inceptisol	8 - 15	690,57
3	3	Inceptisol	15 - 25	336,50

Satuan peta lahan (SPL-2) merupakan kawasan bertopografi perbukitan dengan lereng 8–15%. Kawasan ini terletak di Kecamatan Simpang Mamplam dan Peusangan Siblah Krueng yang luasnya mencapai 690,57 hektar, berada di kawasan hutan produksi dengan penggunaan lahan untuk HTR. Jenis tanah yang ditemukan pada kawasan ini adalah Inceptisol, drainase tanah baik. Kawasan ini tidak dipengaruhi oleh banjir. Ketinggian tempat mencapai 81 m dpl.

Satuan peta lahan (SPL-3) merupakan kawasan bertopografi perbukitan dengan lereng 15 – 25 %. Kawasan ini terletak di Kecamatan Simpang Mamplam yang luasnya mencapai 336,50 hektar, berada di kawasan hutan produksi dengan penggunaan lahan untuk HTR. Jenis tanah yang ditemukan pada kawasan ini adalah Inceptisol, drainase tanah baik. Kawasan ini tidak dipengaruhi oleh banjir. Ketinggian tempat mencapai 103 m dpl.

### Klasifikasi Kesesuaian Lahan

Untuk mengetahui kesesuaian lahan tanaman sengon, jabon dan mahoni maka karakteristik lahan yang didapat dari seluruh titik pengamatan dibandingkan dengan kriteria kesesuaian lahan tanaman sengon, jabon dan

mahoni (LREP II 1994), secara umum kelas kesesuaian lahan tanaman sengon, jabon dan mahoni termasuk dalam kelas kesesuaian lahan sesuai marginal (S3).

### **Kesesuaian Lahan Aktual dan Potensial**

Klasifikasi kesesuaian lahan aktual adalah kelas kesesuaian lahan yang dihasilkan berdasarkan data yang ada pada saat dilakukan penelitian, belum mempertimbangkan usaha perbaikan dan asumsi tingkat pengelolaan yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor pembatas yang dijumpai. Berdasarkan hasil penilaian kelas kesesuaian lahan di lokasi penelitian seluruh titik pengamatan secara aktual sesuai marginal (S3). Faktor pembatas pertumbuhan untuk tanaman sengon, jabon dan mahoni di lokasi penelitian adalah lereng (s) yang masih bisa diperbaiki sehingga dapat meningkatkan kelas kesesuaian lahannya.

Ketersediaan air atau curah hujan yang terdapat pada seluruh lokasi penelitian adalah 2473 mm per tahun. Curah hujan tersebut berada dalam kelas kesesuaian cukup sesuai (S<sub>2</sub>) untuk tanaman sengon dan sangat sesuai (S<sub>1</sub>) untuk tanaman jabon dan mahoni.

Media perakaran atau kedalaman efektif yang terdapat pada lokasi penelitian adalah berkisar antara 100 cm sampai dengan 120 cm. Menurut LREP (1994) yang dilaporkan oleh Hardjowigeno (1999) kedalaman tersebut berada pada kelas kesesuaian cukup sesuai (S2). Tanah yang bersolum dalam yakni kedalaman di atas 100 cm mempunyai kemampuan menyerap air yang lebih besar dan mampu menyimpan cadangan air yang dibutuhkan oleh akar tanaman (Tini & Amri, 2002).

Ketersediaan unsur hara atau kesuburan tanah yang dianalisis adalah kandungan N total, P tersedia dan K. Seluruh lokasi menunjukkan bahwa kandungan unsur hara tersebut berada pada kelas kesesuaian sangat sesuai (S1).

Klasifikasi kesesuaian lahan potensial adalah klasifikasi kesesuaian lahan yang menyatakan keadaan kesesuaian lahan yang dapat dicapai setelah usaha-usaha perbaikan dilakukan. Kesesuaian lahan potensial merupakan kondisi yang diharapkan sesudah diberi masukan sesuai dengan tingkat pengelolaan yang diterapkan sehingga dapat diduga produktivitas dari suatu lahan serta produksi per satuan luasnya.

Kelas kesesuaian lahan potensial cukup sesuai (S2), bisa lebih baik dari kelas kesesuaian lahan aktual karena faktor pembatas berupa kelerengan bersifat sementara yang masih bisa diperbaiki, misalnya dengan membuat terasering dan penanaman tanaman penutup tanah. Kelas kesesuaian lahan potensial untuk tanaman sengon adalah S2 dengan faktor pembatas temperatur, curah hujan dan kedalaman efektif yang merupakan faktor pembatas permanen dan tidak bisa diperbaiki. Kelas kesesuaian lahan potensial untuk tanaman jabon adalah S2 dengan faktor pembatas temperatur yang merupakan faktor pembatas permanen dan tidak bisa diperbaiki. Kelas kesesuaian lahan potensial untuk tanaman mahoni adalah S2 dengan faktor pembatas kedalaman efektif yang merupakan faktor pembatas permanen dan tidak bisa diperbaiki.

### **Analisis Strategi**

Analisis strategi pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen dilakukan dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini menghasilkan peubah-peubah yang bersifat strategis yang terdiri dari faktor internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan dalam menyusun strategi pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen.

Faktor Internal Kekuatan (*strength*). Berdasarkan hasil FGD dan kuesioner terhadap responden diperoleh evaluasi variabel-variabel kekuatan seperti yang disajikan pada Tabel 2. Tabel 2 menunjukkan bahwa, variabel yang mempunyai skor tertinggi adalah ketersediaan areal untuk pengembangan HTR dengan skor (0,592). Sedangkan yang mempunyai skor terendah yaitu program utama pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan (*Pro Poor*) dan bersifat padat karya dengan (0,357).

Faktor internal kelemahan (*weakness*). diperoleh evaluasi variabel-variabel kelemahan seperti yang disajikan pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai skor paling tinggi adalah variabel menanam tanaman kehutanan merupakan investasi jangka panjang dengan skor 0,290. Variabel yang mempunyai skor terendah yaitu variabel kelembagaan HTR masih lemah dengan skor 0,086.

Tabel 2. Evaluasi variabel internal kekuatan

No	Variabel	Bobot	Rating	Skor
1.	Ketersediaan areal	0,148	4	0,592
2.	Peraturan perundang-undangan	0,129	4	0,516
3.	Memiliki peta pencadangan	0,128	4	0,512
4.	Terdapat 3 koperasi Pemegang SK IUPHHK-HTR	0,099	4	0,396
5.	Salah satu program utama pemerintah dalam Mengentaskan kemiskinan ( <i>Pro Poor</i> ) dan bersifat padat karya	0,119	3	0,357
6.	Mengembangkan kegiatan pelestarian alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan	0,122	3	0,366
7.	Kesesuaian tempat tumbuh	0,127	3	0,381
8.	Fungsi tata air	0,128	3	0,384
<b>JUMLAH</b>		<b>1,000</b>		<b>3,504</b>

Tabel 3. Evaluasi variabel internal kelemahan

No	Variabel	Bobot	Rating	Skor
1.	Sumber daya keuangan terbatas	0,141	1	0,141
2.	Latar belakang pendidikan masyarakat sekitar hutan rendah	0,086	2	0,172
3.	Kelembagaan HTR masih lemah	0,086	1	0,086
4.	Menanam tanaman kehutanan merupakan investasi jangka panjang	0,145	2	0,290
5.	Pemegang IUPHHK-HTR hanya berorientasi pada bantuan kredit dari Pemerintah	0,109	2	0,218
6.	Kurangnya sosialisasi dan publikasi tentang HTR	0,144	1	0,144
7.	Teknologi pembibitan masih terbatas	0,141	2	0,282
8.	Belum adanya tata batas di areal HTR	0,148	1	0,148
<b>JUMLAH</b>		<b>1,000</b>		<b>1,481</b>

Faktor eksternal peluang (*opportunity*). Berdasarkan hasil FGD dan kuesioner terhadap responden diperoleh evaluasi variabel-variabel yang berpeluang seperti yang disajikan pada Tabel 4. Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai skor paling tinggi adalah dukungan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dengan skor 0,668. Variabel yang mempunyai skor terendah yaitu variabel kebutuhan kayu di Aceh terus meningkat sehingga HTR bisa dijadikan sumber bahan baku kayu dengan skor 0,405.

Faktor eksternal ancaman (*threat*). Berdasarkan hasil FGD dan kuesioner terhadap responden diperoleh evaluasi variabel-variabel ancaman seperti yang disajikan pada Tabel 5. Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel yang mempunyai skor paling tinggi adalah pengetahuan masyarakat masih kurang dengan skor 0,340. Variabel yang mempunyai skor terendah yaitu variabel proses birokrasi yang panjang dengan skor 0,107.

### Alternatif Strategi Berdasarkan Analisis SWOT

Strategi SO dapat dilakukan dengan; (a) meningkatkan kualitas tenaga pendamping HTR, (b) koperasi pemegang IUPHHK-HTR menjalin kerjasama dengan pengusaha kayu di berbagai wilayah, (c) mengajukan proposal pinjaman bergulir kepada pemerintah, (d) meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang manfaat program HTR, dan meningkatkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Bireuen.

Strategi WO dengan jalan; (a) mencari sumber dana untuk membiayai pembangunan HTR, (b) meningkatkan pendidikan masyarakat sekitar hutan, (c) menguatkan kelembagaan koperasi pemegang IUPHHK-HTR, (d) menerapkan sistem tumpang sari pada pembangunan HTR, (e) memperbanyak sosialisasi dan publikasi tentang HTR, (f) meningkatkan teknologi dan pengetahuan tentang pembibitan, dan (g) koperasi segera menetapkan batas wilayah IUPHHK-HTR.

Tabel 4. Evaluasi variabel eksternal peluang

No	Variabel	Bobot	Rating	Skor
1.	Ketertarikan masyarakat terhadap HTR tinggi	0,133	4	0,532
2.	Tersedia tenaga pendamping HTR	0,141	4	0,564
3.	Kebutuhan kayu di Aceh terus meningkat sehingga HTR bisa dijadikan sumber bahan baku kayu	0,135	3	0,405
4.	Ketersediaan pasar hasil hutan kayu dari HTR	0,132	4	0,528
5.	Tersedia pinjaman bergulir modal kredit dari Pemerintah	0,153	3	0,459
6.	Kesempatan berusaha bagi masyarakat sekitar hutan	0,139	3	0,417
7.	Dukungan Pemerintah baik Pusat maupun Daerah	0,167	4	0,668
JUMLAH		1,000		3,573

Tabel 5. Evaluasi variabel eksternal ancaman

No	Variabel	Bobot	Rating	Skor
1.	Proses birokrasi yang panjang	0,107	1	0,107
2.	Peraturan tentang penatausahaan kayu dari HTR belum tersedia	0,175	1	0,175
3.	Pengetahuan masyarakat masih kurang	0,170	2	0,340
4.	Hama dan penyakit tanaman	0,101	2	0,202
5.	Ketidakpastian usaha	0,096	2	0,192
6.	Perambahan kawasan IUPHHK-HTR	0,175	1	0,175
7.	Konflik dengan masyarakat sekitar yang tidak menjadi anggota koperasi pemegang IUPHHK-HTR	0,176	1	0,176
JUMLAH		1,000		1,367

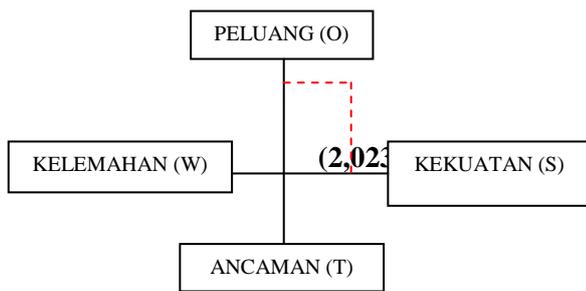
Strategi ST diupayakan dengan cara; (a) memperpendek dan mempermudah proses birokrasi, (b) pemerintah segera menerbitkan peraturan penatausahaan kayu dari HTm, (c) Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang HTR dan cara pengendalian hama dan penyakit tanaman, (d) pemerintah memberikan jaminan kepastian usaha bagi pemegang IUPHHK-HTR, dan (e) koperasi pemegang IUPHHK-HTR menjalin kerjasama dan komunikasi dengan masyarakat sekitar hutan yang tidak menjadi anggota koperasi untuk menghindari konflik dan perambahan kawasan

Strategi WT dengan jalan: (a) meningkatkan kelembagaan dan kinerja koperasi pemegang IUPHHK-HTR, (b) memperbanyak sosialisasi, publikasi, pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, (c) koperasi pemegang IUPHHK-HTR segera melaksanakan tata batas wilayah IUPHHK-HTR untuk menghindari konflik dan perambahan kawasan IUPHHK-HTR, (d) menerapkan sistem tumpang sari pada pembangunan HTR, dan (e) mempermudah proses birokrasi dan penerbitan peraturan penatausahaan kayu dari HTR.

### Analisis Matrik Internal Eksternal

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Bireuen adalah matrik SWOT. Matrik ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dimana matrik ini dapat menghasilkan empat sel kemungkinan alternatif strategis (Rangkuti, 2005).

Hasil analisis menunjukkan bahwa total skor faktor internal kekuatan adalah sebesar 3,504; faktor internal kelemahan sebesar 1,481; sedangkan untuk faktor eksternal peluang sebesar 3,573; faktor eksternal ancaman sebesar 1,367. Berdasarkan nilai-nilai ini diperoleh posisi strategi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Bireuen terletak pada sel 1 dengan nilai koordinat (2,023 ; 2,206) dan diagram SWOT-nya disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Analisis matrik pengembangan HTR

Diagram SWOT pada Gambar 1 menunjukkan bahwa posisi Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Bireuen berada pada sel pertama yang berarti bahwa sistem pengembangan Hutan Tanaman Rakyat di Kabupaten Bireuen saat ini mempunyai kekuatan dan peluang yang menguntungkan. Menurut Rangkuti (2005), apabila posisi berada pada kuadran (sel) 1 merupakan situasi yang sangat menguntungkan karena memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi SO (*strength – Opportunity*) yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dengan memanfaatkan peluang yang ada menjadi kekuatan dalam mengembangkan HTR di Kabupaten Bireuen.

Berdasarkan kekuatan dan peluang yang ada dalam kegiatan pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen saat ini, maka dapat dirumuskan beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan HTR di Kabupaten Bireuen, yaitu : (1) Meningkatkan kualitas tenaga pendamping HTR yang ada di Kabupaten Bireuen baik melalui pelatihan, bimbingan maupun sosialisasi peraturan terbaru serta memberdayakan dan meningkatkan peran pendamping HTR yang ada. Pelatihan yang bisa dilaksanakan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kualitas tenaga pendamping HTR antara lain : pelatihan penguatan kelembagaan HTR, perpetaan dan GIS, bimbingan penyusunan RKT/RKH HTR, teknik pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pemasaran kayu dari HTR, (2) Koperasi pemegang IUPHHK-HTR menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan HTR di Kabupaten Bireuen, antara lain dengan pihak perusahaan pengolah kayu baik yang ada di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh maupun Provinsi Sumatera Utara sehingga terjadi hubungan

timbal balik yang saling menguntungkan dimana perusahaan pengolah kayu bisa memberikan bantuan berupa bibit maupun modal kepada koperasi pemegang IUPHHK-HTR dalam mengembangkan HTR dan jika nantinya sudah panen, hasil kayunya dijual ke perusahaan kayu tersebut untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu. Dengan adanya kerjasama tersebut maka perusahaan pengolah kayu akan mendapat jaminan pasokan bahan baku kayu dari HTR, sedangkan koperasi pemegang IUPHHK-HTR mendapatkan jaminan ketersediaan pemasaran kayu dari HTR, (3) Meningkatkan kinerja koperasi pemegang IUPHHK-HTR dalam mengembangkan HTR di Kabupaten Bireuen agar kegiatan pengembangan HTR dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tahapan pelaksanaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Jika semua tahapan kegiatan pengembangan HTR sudah terlaksana dengan baik dan benar akan memudahkan dalam mendapatkan pinjaman bergulir modal kredit dari Pemerintah dengan terlebih dahulu mengajukan proposal kepada pemerintah, (4) Memperbanyak sosialisasi dan publikasi tentang program pengembangan HTR kepada masyarakat sekitar hutan terutama yang belum menjadi anggota koperasi pemegang IUPHHK-HTR untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya program pengembangan HTR serta manfaat yang bisa diperoleh masyarakat jika program pengembangan HTR berjalan lancar dan berhasil, dan (5) Pemerintah pusat dan daerah dapat memberikan dukungan dan bantuan sepenuhnya terhadap kegiatan pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen, yaitu : (a) melaksanakan sosialisasi peraturan terbaru terkait masalah HTR kepada masyarakat sekitar hutan baik yang menjadi anggota koperasi pemegang IUPHHK-HTR maupun yang bukan, karena peraturan terkait masalah HTR terus berkembang.

Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat tentang program pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen agar masyarakat lebih termotivasi untuk ikut mengembangkan HTR di Kabupaten Bireuen, (b) melaksanakan pelatihan, bimbingan, maupun sosialisasi kepada tenaga pendamping HTR untuk meningkatkan kualitas tenaga pendamping HTR dalam mendampingi kegiatan pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen, (c) memberikan insentif dan biaya operasional kepada tenaga

pendamping HTR dalam melaksanakan pendampingan HTR agar kegiatan pendampingan HTR dapat berjalan dengan lancar. Insentif dan bantuan biaya operasional dapat berupa honor bulanan, bantuan uang makan, biaya pemondokan, uang transportasi dan biaya pertemuan dengan pemangku kepentingan yang terkait pengembangan HTR di Kabupaten Bireuen, dan (d) memfasilitasi koperasi pemegang IUPHHK-HTR dalam menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk pengembangan HTR dan menjamin ketersediaan pasar bagi hasil hutan kayu dari HTR.

### SIMPULAN

Potensi pengembangan Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Bireuen seluas 1.055,19 ha dengan kelas kesesuaian lahan aktual sesuai marginal dan faktor pembatas berupa lereng. Kesesuaian lahan potensial cukup sesuai dengan faktor pembatas temperatur, curah hujan, dan kedalaman efektif.

Strategi yang menjadi prioritas untuk diterapkan adalah strategi SO (*strength – Opportunity*) yaitu mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif dengan memanfaatkan peluang yang ada menjadi kekuatan dalam mengembangkan HTR di Kabupaten Bireuen, Walaupun demikian,

strategi lainnya juga dapat digunakan untuk mendukung strategi SO ini. Alternatif strategi yang dapat diterapkan dalam mengembangkan HTR di Kabupaten Bireuen, yaitu: meningkatkan kualitas tenaga pendamping HTR, koperasi pemegang IUPHHK-HTR menjalin kerjasama dengan pengusaha kayu di berbagai tempat, mengajukan proposal pinjaman bergulir kepada pemerintah, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang manfaat program HTR bagi masyarakat, dan meningkatkan dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten Bireuen

### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Kehutanan. 2011. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.55/Menhut-II/2011. Tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman. Jakarta.
- Pratiwi. 2003. Prospek pohon jabon untuk pengembangan hutan tanaman. Buletin Badan Litbang Kehutanan. Vol. 4 No. 1, Th. 2003:61-66.
- Rangkuti, F. 1997. Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.